

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menyebabkan semakin banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersebut sudah selayaknya perlu mengetahui informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. Banyaknya skandal keuangan merupakan fenomena yang menunjukkan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta informasi keuangan yang sebenarnya terkait kondisi ekonomis perusahaan, sehingga mengakibatkan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan diragukan kualitasnya.

Begitu banyak skandal yang sering muncul dalam pelaporan keuangan di beberapa perusahaan yang memicu hal-hal negatif, seperti adanya kecurangan pihak manajemen dalam melaporkan laba perusahaannya. Skandal akuntansi merupakan isu bisnis yang selalu menarik karena menyangkut trik penyajian informasi. Pihak penyusun mungkin merasa benar, tetapi pihak pembaca menyalahkannya karena tidak sesuai dengan aturan. Indikasinya adalah selalu terjadi kecurangan perusahaan yang menggunakan informasi keuangan sebagai media (Yateno, 2016).

Tindakan manajemen laba (*earnings management*) telah melahirkan beberapa kasus skandal di Indonesia, pernah terjadi skandal keuangan di perusahaan dengan melibatkan persoalan laporan keuangan dengan adanya

kecurangan pihak manajemen dalam melaporkan laba perusahaannya, seperti yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia. Skandal manipulasi pelaporan keuangan mencerminkan rendahnya kualitas pelaporan keuangan dan adanya kasus skandal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama mengenai *corporate governance*.

PT. Garuda Indonesia yang diduga memanipulasi laporan keuangan, pada 2018 PT. Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laba itu berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya yang totalnya mencapai US\$ 306,88 juta. Ternyata ada dua komisaris yang enggan menandatangani laporan keuangan itu. Mereka merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Sebab manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. ([www.financedetik.com](http://www.financedetik.com))

Kasus seperti ini akan melibatkan banyak pihak dan berdampak sangat luas, keterlibatan CEO (*Chief Executive Officer*), komisaris, komite audit, audit internal hingga audit eksternal. Dalam kaitannya dengan manajemen laba, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan yang melanggar peraturan sehingga dapat merugikan banyak pihak tersebut. Beberapa penelitian juga telah dilakukan yang menunjukkan hasil berbeda-beda, dan dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap manajemen laba, antara lain mengacu pada hasil penelitian-penelitian di Indonesia yaitu dari (Kusumaningtyas dan Farida, 2015), (Mughni dan Cahyonowati, 2015), (Mishra, 2016), (Nugraha, 2016), (Marsha dan Gozali,

2017), (Sihombing dan Laksito, 2017) dan (Satrio et.al, 2018). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dinyatakan bahwa kegiatan manajemen laba di latar belakang oleh beberapa faktor dari internal perusahaan.

Lufita dan Suryani (2018) mendefinisikan manajemen laba adalah tindakan–tindakan manajer untuk menaikkan laba (*income increasing*) atau menurunkan laba (*income decreasing*) periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Praktik untuk merekayasa angka laba dapat terjadi secara legal maupun *illegal*. Praktik legal artinya cara yang digunakan tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi dan menggeser periode pendapatan atau biaya. Adapun manajemen laba yang dilakukan secara *illegal* dilakukan dengan cara melaporkan transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dimana nilai dari transaksi tersebut ditambah (*mark up*) atau dikurangi (*mark down*) atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi sehingga akan menghasilkan laba pada nilai atau tingkat tertentu yang dihendaki (Purnomo dan Pratiwi, 2009).

Persoalan manajemen laba sebenarnya bukan hal yang baru dalam praktik pelaporan keuangan pada suatu entitas bisnis. Hal ini disebabkan oleh kejamnya pasar kepada perusahaan yang tidak mampu memenuhi target atau meleset dari yang diperkirakan oleh pasar. Tekanan untuk membuat keuntungan ini berdampak pada perolehan pendapatan bagi manajemen, sehingga manajemen melakukan

*earnings management* untuk mempengaruhi angka laba yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan perusahaan bersangkutan (Mughni dan Cahyonowati, 2015).

Ada beberapa teori mengenai motivasi manajemen laba, Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi, yaitu hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis ekuitas utang (*debt covenant hypothesis*), hipotesis biaya politis (*political cost hypothesis*), motivasi pajak (*tax motivation*), pergantian CEO dan *Initial Public Offering* (Suri dan Dewi, 2018).

Praktik manipulasi laba berupa manajemen laba dilakukan oleh manajemen agar laporan keuangan terlihat baik sehingga mampu menarik investasi yang lebih banyak dan lebih besar terhadap saham perusahaan. Oleh karena itu, peran aktor tata kelola perusahaan seperti komite audit dan auditor eksternal dibutuhkan untuk memberikan fungsi pengawasan di dalam perusahaan agar membatasi perilaku manajemen untuk melakukan manajemen laba (Chen et al., 2007).

Praktik manajemen laba telah mengikis kepercayaan investor dalam kualitas pelaporan keuangan dan menghambat kelancaran arus modal di pasar keuangan. Oleh karena itu, perlu mekanisme pengendalian untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal yaitu *good corporate governance* yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah tindakan manajemen laba yang berlebihan (Dewi dan Khoiruddin, 2016).

Perusahaan saat ini menggunakan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien yang lebih dikenal sebagai *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* berfungsi untuk mengurangi masalah pada tata kelola perusahaan dan membentuk pola kerja manajemen yang terbuka, efektif dan efisien. Dari tata kelola perusahaan yang efektif dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif serta meningkatkan kualitas dari informasi dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, akibatnya investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan (Khurnanto dan Syaffrudin, 2015).

*Good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Upaya untuk menjalankan *good corporate governance* yang tepat di perusahaan, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Secara umum, dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan melalui komite-komite dengan tujuan untuk menggunakan waktu yang efisien dan memanfaatkan keahlian individu masing-masing direktornya (Kusumaningtyas dan Farida, 2015).

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah komite audit yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Tugas dan tanggung jawab komite audit dapat memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berkaitan dengan transparansi dan

pengungkapan diterapkan secara konsisten dan memadai. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan integritas laporan keuangan yang antara lain terlihat dari ketiadaan permasalahan dalam isi dan proses pelaporan keuangan. Sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Selain peran komite audit selaku pihak internal perusahaan, peran kantor akuntan publik selaku pihak eksternal juga menjadi faktor dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan dalam suatu pengambilan keputusan besar maupun keputusan kecil dalam dan juga untuk menilai kinerja suatu perusahaan tersebut. Informasi laba merupakan komponen yang menjadi pusat perhatian dalam pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu pihak manajemen melakukan pengelolaan angka laba. Informasi laba adalah salah satu komponen yang biasanya dijadikan target manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya dengan kebijakan tertentu, sehingga angka laba bisa dinaik turunkan sesuai keinginan (Marsha dan Gozali, 2017).

Menurut Halim (2008) komite audit dapat berperan sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Komite audit sebagai pihak internal yang melakukan pengawasan terhadap kredibilitas laporan keuangan, maka diperlukan juga pengawasan dari pihak eksternal dalam hal ini auditor eksternal. Maraknya praktik manajemen laba yang terjadi, hal tersebut mendorong manajemen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk meminimalkan praktik manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalkan manajemen laba yaitu dengan dibentuknya komite audit.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap manajemen sehubungan dengan pengendalian internal dan manajemen serta pelaporan keuangan. Selain itu, pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big 4* dianggap dapat memperkecil praktik manajemen laba serta dapat meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan (Rahmadani dan Haryanto, 2018).

Karakteristik yang dimiliki komite audit dan kualitas auditor eksternal dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang penting yang dapat melemahkan *agency costs*, mengatur konflik kepentingan dan mengurangi manajemen laba. Komite audit dan auditor eksternal harus mampu melakukan pengendalian yang efektif yang dapat mengurangi adanya keinginan dari manajemen untuk memanipulasi laba (Zgarni et. al, 2016).

Berkaitan dengan tindakan manajemen laba, etika bisnis dalam ajaran Islam, berarti sebuah pemikiran tentang moralitas yang membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi dalam ekonomi dan bisnis yang didasarkan atas ajaran Islam. Etika bisnis Islam mengatur tentang sesuatu yang baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, atau diperbolehkan atau tidaknya perilaku manusia dalam aktivitas bisnis baik dalam lingkup individu maupun organisasi yang didasarkan atas ajaran Islam.

Banyak perbedaan argumentasi mengenai tindakan manajemen laba, apakah manajemen laba legal atau ilegal untuk dilakukan. Pola yang dilakukan dalam manajemen laba yakni dengan cara melakukan pelaporan dengan tehnik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan sarana dalam memperoleh keuntungan atau memuluskan strategi keuangan dari seorang

manajer. Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah mengenai cara memperoleh keuntungan dalam bisnis. Dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengupas tuntas secara langsung tindakan manajemen laba dalam sudut pandang islam yaitu apakah manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang diperbolehkan atau dilarang menurut ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, hal ini memotivasi peneliti untuk menguji kembali beberapa faktor, maka judul penelitian ini adalah *“Pengaruh Kualitas Komite Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit dan ukuran kantor akuntan publik terhadap manajemen laba secara parsial?
- 2) Bagaimana pengaruh ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit dan ukuran kantor akuntan publik terhadap manajemen laba secara simultan?
- 3) Bagaimanakah ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit, ukuran kantor akuntan publik dan manajemen laba dari sudut pandang islam?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit dan ukuran kantor akuntan publik terhadap manajemen laba secara parsial?
- 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit dan ukuran kantor akuntan publik terhadap manajemen laba secara simultan?
- 3) Untuk mengetahui ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, komite audit independen, keahlian komite audit, ukuran kantor akuntan publik dan manajemen laba dari sudut pandang islam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Mahasiswa

Sebagai *literature* dalam penelitian selanjutnya dan untuk menambah ilmu pengetahuan serta penambah pengetahuan tentang akuntansi dan laporan keuangan perusahaan.

- 2) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui tentang tindakan manajemen laba.

3) Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

4) Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah wawasan tentang auditing terutama mengenai pengaruh komite audit dan ukuran kantor akuntan publik terhadap manajemen laba.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Sebagai referensi bagi perusahaan untuk memperbaiki tata kelola perusahaannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2) Bagi Praktisi

Sebagai suatu tinjauan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas.